



## **PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP ISLAMIC SOCIAL RESPONSIBILITY PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

**Riri Mayliza<sup>1</sup> & Arie Yusnelly<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Andalas*

<sup>2</sup>*Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri SUSKA Riau*

*Email : ririmayliza6@gmail.com, arieyusnelly17@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan memanfaatkan aplikasi *SmartPLS* dan menerapkan teknik *Structure Equation Model* (SEM). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif dengan data sekunder, di mana populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, proporsi Komite Audit, jumlah rapat Komite Audit pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam periode waktu selama 5 tahun (2014-2020). Penelitian ini menghasilkan penemuan yang menarik di antaranya adalah bahwa terdapat pengaruh positif signifikan proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Juga terdapat pengaruh positif signifikan ukuran Dewan Komisaris terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Namun, tidak terdapat pengaruh ukuran Komite Audit terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), serta tidak berpengaruh jumlah rapat Komite Audit terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR).

**Kata Kunci : Dewan Komisaris, Komite Audit, Islamic Corporate Social Responsibility.**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of Good Corporate Governance (GCG) on Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) in Islamic Commercial Banks in Indonesia. This study uses data analysis methods by utilizing the SmartPLS application and applying the Structure Equation Model (SEM) technique. This research is a descriptive and quantitative study with secondary data, where the population in this study is 13 Islamic Commercial Banks (BUS) in Indonesia the proportion of Independent Commissioners, the number of Board of Commissioners meetings, the proportion of the Audit Committee, the number of Audit Committee meetings at Commercial Banks Sharia in Indonesia for a period of 5 years (2014-2020). This study resulted in interesting findings including that there is a significant positive effect on the proportion of Independent Commissioners on Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR). There is also a significant positive effect of the size of the Board of Commissioners on Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR). However, there is no effect of the size of the Audit Committee on Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), and no effect on the number of Audit Committee meetings on Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)..*

**Keywords : Board of Commisioners, Audit Committee, Islamic Corporate Social Responsibility.**

## PENDAHULUAN

Perkembangan suatu entitas tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial yang ada di sekitar entitas. Fauziah dan Yudho (2013) menekankan bahwa berbagai industri, termasuk sektor perbankan, harus menyediakan pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan yang meliputi tiga unsur yaitu unsur ekonomi (keuntungan), sosial (masyarakat), dan lingkungan (planet). Perilaku bank terhadap lingkungan sosial merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini dikarenakan lingkungan sosial telah memberikan kontribusi dalam perkembangan entitas tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pertanggungjawaban sosial yang ada di sebuah entitas harus memiliki tujuan dalam perkembangan masyarakat dan lingkungan sekitar. Perkembangan ini termasuk memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari tenaga kerja dan keluarganya yang berada pada entitas, termasuk masyarakat dan komunitas sosial (Amalina dan Sabeni, 2014). Pemberian kontribusi berasal dari hasil operasi maupun kekayaan yang telah dimiliki oleh entitas. Kontribusi yang sering dilakukan adalah dalam bentuk sumbangan dana hingga pelaksanaan kegiatan sosial langsung di masyarakat.

Di Indonesia, pelaporan sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, pasal 66 dan 74. Dalam pasal 66, perseroan terbatas diwajibkan melaporkan laporan tahunan yang sekurang-kurangnya berisi laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah, laporan pengawasan, dan laporan daftar nama anggota direksi, besarnya gaji serta tunjangan. Hal ini lebih dijelaskan secara khusus dalam pasal 74 yang menegaskan bahwa praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilakukan oleh entitas sebagai salah satu tugas wajib, khususnya industri yang berpengaruh dengan sumber

daya alam. Apabila laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini tidak dilaporkan maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbankan syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang positif di mata masyarakat. Perkembangan ini didukung akibat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Islam dalam setiap unsur hidupnya. Nilai syariah selalu dihubungkan dengan konsep pengaruh manusia dengan Allah SWT (*habblul minallah*) dan pengaruh manusia dengan manusia (*habblul minannas*). Oleh karena itu, Amalina dan Sabeni (2014) berpendapat bahwa posisi bank syariah sebagai institusi keuangan yang ada di level nasional maupun internasional seharusnya menjadi pemimpin dalam mendukung implementasi program CSR ini. Di mana tujuan dari prinsip Islam dan program CSR memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga pengaruh antar sesama manusia.

Dunia perbankan Islam, dalam beberapa tahun ini menjadi salah satu isu yang diperhatikan dalam perkembangan dunia perbankan di belahan dunia, khususnya di Indonesia. Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah mengenai *corporate governance* dalam lembaga keuangan syariah. Perhatian perkembangan *corporate governance* perbankan syariah dilatarbelakangi atas rasa keingintahuan peneliti terhadap perbedaan praktik *corporate governance* dalam model keuangan syariah dibandingkan dengan model keuangan konvensional. Sebuah pertanyaan muncul mengenai apakah perbedaan praktik kedua model ini. Pertanyaan tersebut dijabarkan hingga sampai sejauh manakah model teoritis yang perlu dibuat atau diubah dari praktik model keuangan konvensional untuk memenuhi kebutuhan model keuangan syariah. Oleh karena itu, banyak peneliti yang mulai mengidentifikasi dan mendefinisikan

dimensi serta karakteristik dari *corporate governance* dalam dunia keuangan Islam (Musibah dan Wan Sulaiman, 2014).

Dalam implementasi praktik *corporate governance* di dunia keuangan syariah, lembaga yang menggunakan model keuangan berbasis syariah di Indonesia salah satunya adalah Bank Umum Syariah (BUS). Keberadaan BUS dalam dunia keuangan syariah sedang mengalami tahap perkembangan untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam industri perbankan Indonesia. Pelaksanaan praktik BUS di Indonesia didukung dengan penerbitan dokumen cetak biru pengembangan perbankan syariah yang termasuk dalam

kerangka arsitektur perbankan di Indonesia (API). Kerangka perbankan syariah ini digunakan dengan tujuan untuk mencapai sistem keuangan yang sehat, efisien, dan stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Keberadaan BUS dan lembaga syariah lainnya di industri keuangan Indonesia merupakan salah satu napas baru untuk mendukung pertumbuhan industri ini dalam rangka mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik.

Perkembangan lembaga-lembaga syariah, termasuk BUS, dapat dilihat melalui kenaikan kuantitas yang dapat diamati dari tahun ke tahun pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah**

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Bank Umum Syariah</b>							
- Jumlah Bank	11	11	11	11	12	12	13
- Jumlah Kantor	1,215	1,401	1,745	1,998	2,163	1,990	1,869
<b>Unit Usaha Syariah</b>							
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	23	24	24	23	22	22	21
- Jumlah Kantor	262	336	517	590	320	311	332
<b>Badan Pembiayaan Rakyat Syariah</b>							
- Jumlah Bank	150	155	158	163	163	163	166
- Jumlah Kantor	286	364	401	402	439	446	453
<b>Total Kantor</b>	<b>1,024</b>	<b>1,223</b>	<b>1,763</b>	<b>2,101</b>	<b>2,663</b>	<b>2,990</b>	<b>2,993</b>

Sumber : Data Penelitian (2020)

Berdasarkan tabel 1. perkembangan BUS di Indonesia menandakan bahwa lembaga ini telah memiliki porsi tersendiri di mata masyarakat. Kenaikan kuantitas BUS ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk dan jasa yang disediakan oleh BUS. Hal ini menyebabkan asumsi bahwa aspirasi dan harapan masyarakat terhadap bank syariah dalam menjalankan semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah pun menjadi semakin meningkat. Keberadaan praktik *corporate governance* yang baik pun harus menjadi perhatian yang lebih oleh pihak manajemen BUS agar menjaga kepercayaan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, *corporate governance* Islam dalam bank syariah

memegang peran penting dalam menyediakan produk-produk serta dalam kelangsungan transaksi BUS supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini akan meneliti keberadaan dari pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan bagian komponennya sebagai variabel dependen terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sebagai variabel independen pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Pedoman Komisaris Independen).

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui peraturan BEJ yang dikutip oleh FCGI (2002). Peraturan tersebut menyiratkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

### Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (KNKG, 2006)

### Tugas-tugas utama Dewan Komisaris meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil;
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

### Komite Audit

Komite Audit adalah suatu komite yang berfungsi memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (*Egon Zehnder International*, dalam FCGI, 2002). Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : kep. 29/PM/2004, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Anggota Komite Audit perlu mempunyai suatu pedoman tentang tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk *Audit Committee Charter*. *Audit Committee Charter* adalah suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta struktur Komite Audit yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Dewan Komisaris yang dapat menjamin terciptanya kondisi pengawasan suatu perusahaan dengan baik (FCGI, 2002).

Sedangkan untuk jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas suatu perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan

yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan.

### ***Islamic Corporate Social Responsibility (ISR)***

ICSR merupakan pendekatan yang seimbang bagi organisasi untuk mengatasi ekonomi, sosial dan isu lingkungan dengan cara yang menguntungkan orang, dan masyarakat. Dekade terakhir, banyak negara memberikan pentingnya konsep ini untuk menangani masalah tentang pengangguran, kemiskinan, polusi dan masalah-masalah sosial dan lingkungan lainnya. Selanjutnya, krisis keuangan terakhir telah menarik perhatian luas untuk sosial ekonomi dimensi di bidang keuangan dan perbankan. Kemudian, sekarang disepakati bahwa kurangnya etika dan moralitas bisnis yang rendah memiliki konsekuensi *damageable* yang tidak hanya terjadi pada keuangan, tetapi juga sosial dan lingkungan. (Wardani, 2015)

Dalam perspektif Islam, ICSR merupakan realisasi dari konsep ajaran *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. *Ihsan* merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan *ridho* Allah SWT. Disamping itu, ICSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah. (Djakfar, 2012)

Islam merupakan agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Konsep etika dalam Islam terbentuk akuntabilitas perspektif ekonomi

Islam yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan prinsip Syariah. Haniffa berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. (Hendrik, 2008)

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif Sugiyono (2012) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### **Populasi dan Sampel**

#### **Populasi**

Penelitian ini menganalisis Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan terhadap *Islamic Corporate Sosial Responsibility* (ICSR) dalam *annual report* Bank Umum Syariah di Indonesia dalam perspektif Islam. Dengan demikian maka Populasi yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah 13 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

#### **Sampel**

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive random sampling*, dimana pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui

sebelumnya. Adapun sampel yang diambil adalah seluruh elemen yang terlibat dalam penelitian ini seperti, proporsi Komisaris Independen, jumlah Rapat Dewan Komisaris, proporsi Komite Audit, jumlah rapat Komite Audit pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang berjumlah 208 sampel.

**Rancangan Instrumen Penelitian**

**Statistik Inferensial**

Statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini mengaplikasikan metode *Structural Equation Model* berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *SmartPLS 2.0 M3*. Pemilihan metode PLS berdasarkan pertimbangan bahwa dalam

penelitian ini terdapat konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi.

**Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)**

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi melalui *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity* dari indikator pembentuk konstruk laten dan *Composite Reliability* untuk blok indikatornya (Ghozali, 2012).

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 2. Outer Loading (Measurement Model)**

Variabel	Outer Loading
ISR	1
Jumlah Rapat Komite Audit	1
LEVERAGE	1
Proporsi Dewan Komisaris Independen	1
ROA	1
SIZE	1
UDK	1
Ukuran Komite Audit	1

*Sumber : Data Olahan (2020)*

Dari tabel diperoleh pengujian *outer loading* indikator untuk semua variabel memiliki nilai besar dari 0.5. Sehingga

ukuran reflektif individual dikatakan memenuhi syarat.

**Tabel 3. Nilai Discriminant Validity (Cross Loading)**

Variabel	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	ISR	JUMLAH RAPAT KOMITE AUDIT	LEVERAGE	PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN	ROA	SIZE	UKURAN DEWAN KOMISARIS	UKURAN KOMITE AUDIT
<b>ISR</b>	0.541224	1.000000	-0.074072	0.259684	0.254122	-0.096133	0.295559	0.427959	-0.048932
<b>Jumlah Rapat Komite Audit</b>	-0.050472	- 0.074072	1.000000	-0.091779	-0.218323	-0.011570	0.485618	0.247712	0.550737
<b>LEVERAGE</b>	0.440661	0.259684	-0.091779	1.000000	-0.035332	0.017913	-0.031767	0.163886	-0.282237
<b>Proporsi Dewan Komisaris Independen</b>	-0.321745	0.254122	-0.218323	-0.035332	1.000000	-0.018195	-0.262271	-0.268611	-0.247048
<b>ROA</b>	0.166462	- 0.096133	-0.011570	0.017913	-0.018195	1.000000	-0.054976	-0.109222	-0.015430
<b>SIZE</b>	0.168465	0.295559	0.485618	-0.031767	-0.262271	-0.054976	1.000000	0.641879	0.506747
<b>UDK</b>	0.293490	0.427959	0.247712	0.163886	-0.268611	-0.109222	0.641879	1.000000	0.203278
<b>Ukuran Komite Audit</b>	-0.088388	- 0.048932	0.550737	-0.282237	-0.247048	-0.015430	0.506747	0.203278	1.000000

Sumber: Data Olahan (2020)

Dari tabel diatas dilihat bahwa beberapa nilai *loading factor* untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten tidak ada yang memiliki nilai *loading factor* yang tidak paling besar dibanding nilai *loading* jika dihubungkan dengan variabel

laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten telah memiliki *discriminant validity* yang baik dimana beberapa variabel laten tidak memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya.

**Tabel 4. Average Variance Extracted (AVE)**

	AVE	Composite Reliability	Cronbachs Alpha
<b>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</b>	1.000000	1.000000	1.000000
<b>ISR</b>	1.000000	1.000000	1.000000
<b>JUMLAH RAPAT KOMITE AUDIT</b>	1.000000	1.000000	1.000000
<b>LEVERAGE</b>	1.000000	1.000000	1.000000
<b>PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN</b>	1.000000	1.000000	1.000000
<b>ROA</b>	1.000000	1.000000	1.000000
<b>SIZE</b>	1.000000	1.000000	1.000000
<b>UKURAN DEWAN KOMISARIS</b>	1.000000	1.000000	1.000000
<b>UKURAN KOMITE AUDIT</b>	1.000000	1.000000	1.000000

Sumber : Data Olahan (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini

ditunjukkan dengan nilai Cronbach's Alpha *composite reliability* di atas 0,70 dan AVE

diatas 0,50 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

**Tabel 5. Model Struktural (*Inner Model*) dan GoF**

	Communality	R Square
JUMLAH RAPAT KOMITE AUDIT	1	
LEVERAGE	1	
PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN	1	
ROA	1	
SIZE	1	
UKURAN DEWAN KOMISARIS	1	
UKURAN KOMITE AUDIT	1	
RATA-RATA	1	0.681434
GOF	0.825490157	

*Sumber : Data Olahan (2020)*

**Tabel 6. Pengujian Signifikansi dan Pengujian Hipotesis**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ((O/STERR))
JUMLAH RAPAT KOMITE AUDIT -> ICSR	-0.099589	-0.110682	0.117834	0.117834	0.845163
LEVERAGE -> ICSR	-0.044664	-0.035140	0.087677	0.087677	0.509417
PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN -> ICSR	0.572120	0.581396	0.137390	0.137390	4.164215
ROA -> ICSR	-0.154243	-0.147868	0.092510	0.092510	1.667315
SIZE -> ICSR	0.162607	0.192175	0.134784	0.134784	1.206432
UKURAN DEWAN KOMISARIS -> ICSR	0.289396	0.287924	0.134689	0.134689	2.148617
UKURAN KOMITE AUDIT -> ICSR	0.049170	0.047784	0.102103	0.102103	0.481573

*Sumber : Data Olahan (2020)*

### **Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap ICSR**

Berdasarkan hasil analisis yang dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan nilai koefisien jalur jumlah rapat komite audit terhadap ICSR sebesar -0,099 dengan nilai t hitung sebesar 0,845. Nilai tersebut lebih

kecil dari t tabel 2,012. Hasil ini membuktikan pengaruh tidak signifikan jumlah rapat komite audit terhadap ICSR.

Rapat rutin dengan dewan komisaris untuk melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala, sedangkan rapat rutin

dengan manajemen untuk membicarakan semua pokok-pokok persoalan yang dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial organisasi secara “terbuka” sehubungan dengan perannya untuk mengawasi *Corporate Governance*.

Frekuensi rapat komite audit, dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, komite audit dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri. Dalam rapatnya, komite audit dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau mendiskusikan isu-isu signifikan telah dikomunikasikan dengan manajemen, tetapi menurut penilaian komite audit memerlukan tindakan yang lebih lanjut (De Zoort et al, 2002).

### **Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap ICSR**

Berdasarkan hasil analisis yang dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan nilai koefisien jalur proporsi dewan komisaris independen terhadap ICSR sebesar 0,572 dengan nilai  $t$  hitung sebesar 4,164. Nilai tersebut lebih besar dari  $t$  tabel 2,012. Hasil ini membuktikan pengaruh signifikan proporsi dewan komisaris independen terhadap ICSR.

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Wardhani & Cahyonowati (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia.

Rustam (2013) menyatakan bahwa, “Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (UU) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan otoritas terkait.”

Komposisi Dewan Komisaris Independen, berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap ISR**

Berdasarkan hasil analisis yang dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan nilai koefisien jalur ukuran dewan komisaris terhadap ISR sebesar 0,289 dengan nilai  $t$  hitung sebesar 2,148. Nilai tersebut lebih besar dari  $t$  tabel 2,012. Hasil ini membuktikan pengaruh signifikan ukuran dewan komisaris terhadap ICSR.

Hal ini senada dengan Collier dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya.

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari *principal* dan mengontrol perilaku oportunistis manajemen. Dewan komisaris menjembatani kepentingan *principal* dan manajer di dalam perusahaan.

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi yang ada di perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki

otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak.

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap ICSR**

Berdasarkan hasil analisis yang dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan nilai koefisien jalur ukuran komite audit terhadap ICSR sebesar 0,049 dengan nilai t hitung sebesar 0,481. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel 2,012. Hasil ini membuktikan pengaruh tidak signifikan ukuran komite audit terhadap ICSR.

Hasil Penelitian Hariati dan Rihatiningtyas (2015) mengungkapkan bahwa Komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini disebabkan karena komite audit bukanlah menjadi salah satu faktor penentu untuk meningkatkan efektifitas fungsi komite audit, khususnya yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan (FCGI, 2008).

Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Karena tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris maka dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan semakin baik dan diharapkan dapat memperkecil upaya manajemen untuk memanipulasi masalah data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin meningkat. Hasil penelitian Arifani (2013) mendukung hal tersebut yang mengatakan bahwa bahwa ukuran komite audit

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### **KESIMPULAN**

Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap ICSR Hasil ini membuktikan pengaruh signifikan proporsi dewan komisaris independen terhadap ICSR. Ukuran Dewan Komisaris terhadap ICSR Hasil ini membuktikan tidak ada pengaruh signifikan ukuran dewan komisaris terhadap ICSR. Ukuran Komite Audit terhadap ICSR Hasil ini membuktikan tidak ada pengaruh signifikan ukuran komite audit terhadap ICSR. Jumlah rapat Komite Audit terhadap ICSR. Hasil ini membuktikan pengaruh tidak signifikan jumlah rapat komite audit terhadap ICSR.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalina, Nur., & Sabeni, Arifin. 2014. Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2008-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(1), p. 1-15.
- Arifani, Rizky. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal FEB Universitas Brawijaya*, 1(2).
- De Zoort, F. T. 2002. An investigation of audit committees' oversight responsibilities. *ABACUS*, 33(2), p. 208-227.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar Plus. Jakarta.
- Fauziah, Khusnul & Yudho P. J. 2013. Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks. *Jurnal*

- Dinamika Akuntansi*, 5(1), p. 12-20.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Citra Graha. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hariati, Isnin., & Rihatiningtyas, Y.W. 2015. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*.
- Hendrik, Budi Untung. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum GCG Indonesia*. Jakarta.
- Musibah, Anwar Salem., & Wan Sulaiman. 2013. Impact of Intellectual Capital on Corporate Social Responsibility Evidende from Islamic Banking Sector in GCG. *International Journal of Finance and Accounting*, 2(6), p. 307-211.
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sembiring, 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Paper Presented at the Seminar Nasional Akuntansi*, Solo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Wardani, Eka Ayu. 2015. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Reputasi Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*.
- Wardhani, S. R., & Cahyonowati, N. 2011. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Karakteristik Corporate Governance Pada Sektor Finansial. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), p. 182-202.